

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan kemajuan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, harapan akuntabilitas pemerintah terkait kinerjanya menjadi lazim. Untuk memperkuat harapan tersebut, penting bagi instansi pemerintah untuk mengungkapkan informasi tentang kegiatan dan kinerja mereka kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik, sering dikaitkan dengan pemerintah, memikul tanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah, sebagai lembaga publik, harus memberikan akuntabilitas atas kinerjanya melalui laporan keuangan. Adalah tugas pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara sistematis, mematuhi standar hukum, dan memastikannya efisien, ekonomis, efektif, dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai sarana akuntabilitas dalam administrasi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya nyata untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah melibatkan penyerahan laporan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan berfungsi sebagai representasi sistematis dari kondisi keuangan dan hasil operasional entitas (IAI, 2017). Sebagaimana diuraikan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh Asosiasi Akuntan Indonesia pada tahun 2017, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan wawasan

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, yang penting bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah selama periode tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan utama meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Neraca Anggaran (SAL Change Report), Neraca, Laporan Operasi (LO), Pernyataan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Laporan Keuangan (CALK). Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa isi laporan keuangan pemerintah umumnya mencerminkan informasi keuangan dan kejadian selama periode tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan, yang kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) dan kemudian dipublikasikan kepada warga negara sebagai pemangku kepentingan dana yang digunakan oleh pemerintah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan berfungsi sebagai acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, data yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus relevan dan selaras dengan kebutuhan pengguna (Nurillah, 2014). Informasi menjadi berharga ketika membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat diandalkan. Akibatnya, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk fokus pada informasi yang diberikan dalam laporan keuangan untuk

tujuan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi (Husna, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, penting agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk membuat laporan keuangan yang berharga bagi pengguna. Kaliber laporan keuangan ini ditunjukkan melalui karakteristik kualitatifnya. Kondisi normatif penting yang diperlukan untuk laporan keuangan pemerintah untuk mencapai kualitas yang diharapkan meliputi relevansi, keandalan, komparabilitas, dan pemahaman.

Pembuatan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan keterampilan SDM yang mahir dan pemahaman menyeluruh tentang peraturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh Ihsanti (2014), kompetensi SDM mengacu pada kemampuan untuk melakukan fungsi yang secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi. Kompetensi SDM berfungsi sebagai elemen penting dalam pengembangan laporan keuangan berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, kehadiran kompetensi SDM yang memungkinkan individu untuk mencapai kinerja yang unggul dalam perannya memainkan peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan entitas yang relevan (Wati 2014).

Kaliber laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal di dalam lembaga-lembaga tersebut. Pengendalian internal yang tidak memadai menciptakan tantangan dalam mengidentifikasi perbedaan atau ketidakakuratan dalam praktik akuntansi,

membuat bukti audit yang berasal dari data akuntansi tidak dapat diandalkan (Winidyaningrum, 2009).

Pengendalian internal dalam entitas perusahaan, baik untuk nirlaba atau nirlaba, sangat penting dan sangat diperlukan karena kegiatan operasional dan kinerjanya menuntut kebijakan khusus yang dapat mengakomodasi dan memberlakukan pembatasan dan ketentuan khusus untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Implementasi pengendalian internal sangat penting untuk memfasilitasi identifikasi dan analisis masalah yang ada atau masalah potensial yang mungkin timbul selama pengejaran tujuan, memungkinkan kita untuk secara jelas memastikan kemajuan menuju tujuan tersebut. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah, ada konfrontasi terus-menerus dengan tantangan rumit, dengan masalah yang paling umum adalah korupsi, maladministrasi, dan manajemen keuangan yang tidak efektif.

SDM yang kompeten dan SPI yang efektivitas akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Keduanya saling melengkapi dan bekerjasama untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang di hasilkan akurat, andal, jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 27 Mei 2022 Dengan Nomor Lampiran 196.A/LHP/XIX.KUP/07/2022 menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. Berikut merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.

Tabel 1.1

Kesalahan Penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang

ITEM PENGANGGARAN	SEHARUSNY A	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH (RP)
PAD Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	PAD-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	276.700.000,00	131.554.700,00	103.884.700
Belanja Barang Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Aset Lainnya Aset Renovasi	1.900.270.000,00	1.842.853.000,00	57.417.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang Jasa- Barang yang diserahkan kepada pihak lain	1.350.000.000,00	1.247.400.000,00	102.600.000
JUMLAH		3.526.970.000	3.221.807.700	305.162.300

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat tiga kesalahan penulisan akun/item dalam Penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, meskipun anggaran tersebut terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana penganggaran. BPK menambahkan bahwa permasalahan tersebut disebabkan kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran kurang cermat dalam mengusulkan penganggaran pendapatan dan belanja tidak sesuai substansinya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan evaluasi atas dokumen usulan anggaran oleh OPD belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. oleh karena itu dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUPANG)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang?
2. Apakah sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sbb:

1. Bagi Akademis
2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang
3. Peneliti
4. Peneliti Selanjutan